



**KOMUNIKASI SOSIAL SATGAS PAMTAS RI-RDTL DALAM MEMPERKUAT
KETAHANAN WILAYAH GUNA Mendukung Stabilitas Keamanan Di
KAWASAN PERBATASAN**

*The Social Communication of the Indonesia–Timor Leste Border Security Task Force on
Strengthening Territorial Resilience to Support Security Stability in the Border Region*

Jimat Suryo Utomo

Magister Strategi Pertahanan Darat, Universitas Pertahanan RI

Jurnal Sejarah Militer Unhan

Email korespondensi: jimatsuryo@gmail.com

Abstract

The border area between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste (RI–RDTL) is a strategic region that requires a comprehensive security approach. This study analyzes the influence of the RI–RDTL Border Security Task Force’s (Satgas Pamantas) social communication strategy in strengthening territorial resilience to support security stability in the border region. The study employs a qualitative method through literature review and policy document analysis, interpreted through an integrated conceptual framework combining total defense doctrine, strategic communication theory, social capital theory, the securitization/human security debate, defense diplomacy, and borderland studies. The findings show that the Task Force’s social communication strategy operates through three dimensions — interpersonal communication via civic action, mass communication via local media and community dialogue, and cultural communication via local wisdom — which jointly build social capital and trust between security forces and border communities. This social capital functions as an intervening mechanism that reduces cross-border conflict, strengthens community participation in territorial security, and reframes border communities from passive security objects into active partners within the total defense system. The study concludes that the Task Force’s social communication strategy makes a significant, theoretically explainable contribution to territorial resilience and, in turn, to border security stability, and recommends institutionalizing social communication within the Task Force’s doctrine and standard operating procedures as part of a community-centered approach to border resilience.

Keywords: Border Security Task Force; Indonesia–Timor-Leste Border (RI–RDTL); Regional Resilience; Social Capital; Social Communication

Abstrak

Kawasan perbatasan Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL) merupakan kawasan strategis yang memerlukan pendekatan keamanan komprehensif. Penelitian ini menganalisis pengaruh strategi komunikasi sosial Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamantas) RI-RDTL dalam memperkuat ketahanan wilayah guna mendukung stabilitas keamanan di kawasan perbatasan. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan, yang dimaknai melalui kerangka konseptual terintegrasi yang menggabungkan doktrin pertahanan semesta, teori komunikasi strategis, teori modal sosial, perdebatan sekuritisasi/keamanan manusia, diplomasi pertahanan, dan studi kawasan perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi sosial Satgas Pamantas berjalan melalui tiga dimensi, yaitu komunikasi interpersonal melalui civic action, komunikasi massa melalui media lokal dan dialog komunitas, serta komunikasi budaya

melalui kearifan lokal, yang secara bersama-sama membangun modal sosial dan kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat perbatasan. Modal sosial ini berfungsi sebagai mekanisme antara yang menurunkan konflik lintas batas, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengamanan wilayah, dan mengubah posisi masyarakat perbatasan dari objek pengamanan pasif menjadi mitra aktif dalam sistem pertahanan semesta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi sosial Satgas Pamtas memberikan kontribusi signifikan dan dapat dijelaskan secara teoretis terhadap penguatan ketahanan wilayah, yang pada gilirannya mendukung stabilitas keamanan perbatasan, serta merekomendasikan institusionalisasi komunikasi sosial ke dalam doktrin dan standar operasional prosedur Satgas Pamtas sebagai bagian dari pendekatan ketahanan wilayah berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Ketahanan Wilayah; Keamanan Perbatasan; Komunikasi Sosial; Modal Sosial; RI-RDTL; Satgas Pamtas

1. Latar Belakang

Kawasan perbatasan merupakan garis pertahanan terdepan kedaulatan suatu bangsa. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki perbatasan darat dengan sepuluh negara tetangga, termasuk Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Pulau Timor. Perbatasan RI-RDTL membentang sepanjang 268 kilometer yang membagi Pulau Timor menjadi dua wilayah berbeda kedaulatan namun memiliki keterkaitan historis, sosial, budaya, dan ekonomi yang kuat (International Crisis Group, 2006). Garis batas ini membentang dari utara ke selatan melewati berbagai daerah dan, secara administratif, membelah desa-desa yang secara sosial dan kultural tetap menyatu ke dalam dua wilayah kedaulatan yang berbeda.

Hingga saat ini keamanan perbatasan RI-RDTL masih menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari perdagangan ilegal lintas batas, perlintasan orang tanpa dokumen, konflik lahan, hingga isu-isu sensitif pascareferendum 1999, seperti keberadaan mantan pengungsi dan bekas anggota milisi yang sewaktu-waktu dapat memicu ketegangan lokal dengan implikasi nasional (International Crisis Group, 2006, 2010). Untuk menghadapi tantangan multidimensional ini, pendekatan keamanan yang semata mengandalkan cara-cara militer bersifat represif tidak lagi memadai. Diperlukan strategi pertahanan yang mengintegrasikan aspek militer dengan pendekatan sosial-komunikatif untuk membangun ketahanan wilayah yang berkelanjutan (Ronaldi, 2025).

Kebutuhan tersebut sejalan dengan mandat konstitusional dan yuridis pertahanan negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa pertahanan negara bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional, dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dan masyarakat sebagai bagian dari komponen cadangan dan pendukung. Ketentuan ini memberi

dasar normatif bagi peran ganda Satgas Pamtas RI-RDTL sebagai unsur operasional TNI di wilayah perbatasan: sebagai penjaga keamanan fisik wilayah sekaligus sebagai agen diplomasi pertahanan di tingkat lokal, yang diwujudkan melalui penerapan strategi komunikasi sosial berorientasi pada pembinaan kedekatan dengan komunitas perbatasan, penciptaan hubungan yang kondusif, serta penguatan ketahanan wilayah sebagai fondasi stabilitas keamanan (Herdiawan & Ahmadi, 2025).

Persoalannya, sejauh mana strategi komunikasi sosial tersebut benar-benar berkontribusi terhadap penguatan ketahanan wilayah, dan melalui mekanisme apa kontribusi tersebut terjadi, belum banyak dijelaskan secara teoretis dalam literatur pertahanan Indonesia. Studi-studi terdahulu mengenai perbatasan RI-RDTL cenderung berhenti pada level deskripsi kebijakan keamanan formal (International Crisis Group, 2006, 2010; Scitepress, 2018), sementara studi mengenai ketahanan wilayah perbatasan lain di Indonesia lebih banyak membahas konteks maritim (Herdiawan & Ahmadi, 2025; Puspitawati et al., 2023). Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara sistematis implementasi strategi komunikasi sosial Satgas Pamtas RI-RDTL, pengaruhnya terhadap ketahanan wilayah, dan kontribusi ketahanan wilayah tersebut terhadap stabilitas keamanan, sekaligus membangun kerangka konseptual yang menjelaskan mekanisme di baliknya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana implementasi strategi komunikasi sosial Satgas Pamtas RI-RDTL di kawasan perbatasan? Kedua, bagaimana pengaruh strategi komunikasi sosial Satgas Pamtas tersebut terhadap penguatan ketahanan wilayah? Ketiga, bagaimana kontribusi ketahanan wilayah yang diperkuat terhadap stabilitas keamanan di kawasan perbatasan RI-RDTL? Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan implementasi strategi komunikasi sosial Satgas Pamtas RI-RDTL, menganalisis pengaruh strategi komunikasi sosial terhadap penguatan ketahanan wilayah melalui kerangka konseptual yang terintegrasi, dan mengevaluasi kontribusi ketahanan wilayah terhadap stabilitas keamanan perbatasan.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual

2.1 Ketahanan Nasional dan Ketahanan Wilayah dalam Perspektif Astagatra

Ketahanan wilayah tidak dapat dilepaskan dari konsep induknya, yaitu ketahanan nasional, yang dalam doktrin strategis Indonesia dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang

berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), baik yang datang dari luar maupun dari dalam, guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya (Lemhannas RI, 2024). Konsep ini dioperasionalkan melalui kerangka Astagatra, yang membagi kehidupan nasional ke dalam delapan aspek atau gatra yang saling terkait, yaitu tiga gatra alamiah (Trigatra: geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam) serta lima gatra sosial (Pancagatra: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan). Karakter khas Astagatra terletak pada sifatnya yang komprehensif-integral, yakni bahwa kekuatan atau kelemahan pada satu gatra akan memengaruhi kondisi gatra-gatra lainnya secara timbal balik.

Ketika kerangka Astagatra diturunkan ke tingkat wilayah, khususnya kawasan perbatasan, ketahanan wilayah dapat dimaknai sebagai kondisi dinamis suatu daerah perbatasan yang mencerminkan keterpaduan aspek geografis, demografis, sumber daya, sosial-budaya, ekonomi, serta pertahanan-keamanan dalam menghadapi ancaman spesifik yang melekat pada karakter wilayah perbatasan. Herdiawan dan Ahmadi (2025) menegaskan bahwa penguatan ketahanan wilayah di kawasan perbatasan, sebagaimana ditunjukkan pada kasus perbatasan laut utara Indonesia, menuntut pendekatan komprehensif yang memadukan dimensi pertahanan, diplomasi, pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan identitas budaya, bukan semata penguatan kapasitas militer. Argumen ini relevan dengan konteks perbatasan darat RI-RDTL, yang juga menghadapi kompleksitas multidimensional serupa meskipun dengan karakter geografis darat, bukan maritim.

Sejalan dengan itu, Puspitawati et al. (2023) menekankan pentingnya rekonstruksi paradigma pengelolaan wilayah negara, dari pendekatan yang semata berorientasi pada penjagaan garis batas (border-line security) menuju pendekatan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor aktif dan mitra strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah, bukan sekadar objek pengamanan. Pergeseran paradigma inilah yang menjadi titik tolak konseptual artikel ini: bahwa ketahanan wilayah perbatasan RI-RDTL tidak dapat dibangun semata melalui penguatan pos-pos pengamanan fisik, melainkan juga memerlukan penguatan gatra sosial-budaya melalui strategi komunikasi sosial yang mampu mengintegrasikan masyarakat perbatasan ke dalam sistem ketahanan wilayah secara aktif dan partisipatif. Gatra sosial-budaya dan gatra pertahanan-keamanan menempati posisi sentral dalam kajian ini, karena keduanya menjadi ruang tempat strategi komunikasi sosial Satgas Pamtas beroperasi secara langsung.

2.2 Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dan Doktrin Bela Negara



Landasan yuridis-konseptual kedua yang memperkuat artikel ini adalah doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem pertahanan negara Indonesia secara eksplisit dirancang bersifat semesta, yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Dalam kerangka Sishankamrata, Tentara Nasional Indonesia diposisikan sebagai komponen utama pertahanan negara, sementara sumber daya nasional lainnya, termasuk masyarakat sipil, berfungsi sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Ketentuan ini memberikan dasar normatif bagi peran ganda Satgas Pamtas RI-RDTL: di satu sisi menjalankan fungsi pertahanan fisik sebagai bagian dari komponen utama, dan di sisi lain berfungsi sebagai fasilitator yang mengaktifkan potensi komponen cadangan dan pendukung, yaitu masyarakat perbatasan, melalui strategi komunikasi sosial. Doktrin ini juga selaras dengan konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menempatkan tugas membantu pemerintahan di daerah, termasuk pengamanan wilayah perbatasan, sebagai salah satu bentuk operasi militer selain perang. Aktivitas civic action, bantuan kesehatan, dan pendampingan sosial yang dilakukan Satgas Pamtas merupakan wujud nyata OMSP yang secara langsung berkontribusi pada penguatan hubungan sipil-militer di wilayah perbatasan.

Ronaldi (2025) memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa strategi pertahanan kontemporer di kawasan perbatasan harus mengintegrasikan kebijakan publik dan strategi pertahanan secara koheren, menempatkan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda keamanan. Doktrin bela negara turut memperkuat basis ini: bela negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ketika Satgas Pamtas berhasil membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat perbatasan melalui strategi komunikasi sosial, pada hakikatnya yang terjadi adalah proses internalisasi nilai bela negara di tingkat akar rumput, yang mengubah

masyarakat dari pihak yang pasif menerima perlindungan menjadi subjek yang aktif berkontribusi pada pertahanan wilayahnya sendiri.

2.3 Komunikasi Strategis dalam Konteks Pertahanan dan Keamanan

Untuk memperdalam pembahasan mengenai strategi komunikasi sosial, artikel ini merujuk pada teori komunikasi strategis (strategic communication) yang dikembangkan oleh Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, Verčič, dan Sriramesh (2007). Mereka mendefinisikan komunikasi strategis sebagai penggunaan komunikasi secara sengaja oleh suatu organisasi untuk memenuhi misinya, mencakup berbagai bidang praktik seperti manajemen, pemasaran, hubungan masyarakat, kampanye informasi, komunikasi politik, dan kampanye keselamatan dan kesehatan. Dalam konteks operasi militer di wilayah perbatasan, komunikasi strategis berfungsi ganda: sebagai instrumen operasional untuk memperoleh informasi berbasis masyarakat (community-based intelligence), sekaligus sebagai instrumen legitimasi yang membangun penerimaan sosial (social acceptance) terhadap kehadiran aparat keamanan.

Tiga dimensi komunikasi sosial yang diidentifikasi dalam artikel ini, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi massa, dan komunikasi budaya, pada dasarnya merupakan penjabaran operasional dari komunikasi strategis pada level taktis. Komunikasi interpersonal melalui civic action mencerminkan pendekatan relational communication yang membangun hubungan jangka panjang berbasis kepercayaan personal; komunikasi massa melalui forum komunitas mencerminkan pendekatan public information campaign yang menyoal pembentukan persepsi kolektif; sedangkan komunikasi budaya mencerminkan pendekatan culturally sensitive communication yang mengakui bahwa efektivitas pesan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kerangka nilai penerima pesan (IOM, 2016).

Temuan mengenai pemanfaatan platform digital seperti WhatsApp dalam koordinasi keamanan perbatasan (Jurnal PTIK, 2025) memberikan dimensi tambahan yang penting bagi teori komunikasi strategis kontemporer, yaitu bahwa saluran komunikasi informal dan berbasis teknologi telah menjadi pelengkap saluran komunikasi formal yang cenderung lambat dan birokratis. Berdasarkan karakteristik tugas dan lingkungan operasi yang serupa, dapat diasumsikan bahwa Satgas Pamantas RI-RDTL juga memanfaatkan pola komunikasi informal tersebut untuk memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung deteksi dini terhadap berbagai ancaman keamanan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi strategis dalam konteks keamanan perlu dinilai dari kualitas hubungan

yang dihasilkan dan dampaknya terhadap perilaku aktor yang dituju, bukan semata dari intensitas kegiatan komunikasi itu sendiri.

2.4 Modal Sosial dan Kepercayaan sebagai Basis Ketahanan Wilayah

Untuk menjelaskan mekanisme melalui mana komunikasi sosial dapat menghasilkan penguatan ketahanan wilayah, artikel ini mengintegrasikan teori modal sosial (social capital theory) yang dikembangkan oleh Coleman (1988) dan Putnam (2000). Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya yang melekat pada struktur hubungan sosial, yang memungkinkan aktor mencapai tujuan tertentu yang tidak akan tercapai tanpa keberadaan hubungan tersebut. Putnam memperluas konsep ini dengan menekankan tiga komponen utama modal sosial, yaitu jaringan sosial (networks), norma resiprositas (norms of reciprocity), dan kepercayaan sosial (social trust), yang secara kolektif memungkinkan masyarakat bertindak lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama, termasuk tujuan keamanan kolektif.

Dalam konteks kawasan perbatasan RI-RDTL, modal sosial memiliki dua bentuk yang relevan, yaitu bonding social capital dan bridging social capital. Bonding social capital merujuk pada ikatan sosial yang kuat di dalam komunitas perbatasan itu sendiri, yang di kawasan RI-RDTL banyak dibentuk oleh kesamaan etnis, bahasa, dan kekerabatan lintas batas sebagai warisan sejarah sebelum terbentuknya garis batas negara modern. Bridging social capital, di sisi lain, merujuk pada jembatan sosial yang menghubungkan komunitas perbatasan dengan aktor eksternal, dalam hal ini Satgas Pamtas sebagai representasi negara. Strategi komunikasi sosial Satgas Pamtas, khususnya melalui dimensi komunikasi budaya yang menghormati kearifan lokal, pada dasarnya berfungsi membangun bridging social capital tanpa merusak bonding social capital yang telah ada, sehingga tercipta struktur modal sosial yang berlapis dan saling menguatkan.

Kepercayaan (trust), sebagai inti dari modal sosial, memainkan peran sebagai variabel antara (intervening variable) yang menjelaskan mengapa strategi komunikasi sosial dapat memengaruhi ketahanan wilayah. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap Satgas Pamtas meningkat, hal ini menurunkan biaya transaksi sosial (social transaction cost) dalam pertukaran informasi keamanan, karena masyarakat tidak lagi memandang aparat sebagai pihak asing yang harus diwaspadai, melainkan sebagai mitra yang dapat diajak bekerja sama. Penurunan biaya transaksi sosial inilah yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas sistem deteksi dini berbasis masyarakat dan menurunkan intensitas konflik lintas batas, sebagaimana dicatat pula oleh International Crisis Group (2006, 2010) dalam kajiannya mengenai dinamika ketegangan

di perbatasan RI-RDTL yang kerap dipicu oleh persoalan lokal yang tereskalasi akibat minimnya saluran komunikasi dan kepercayaan antarpihak.

2.5 Pergeseran Paradigma Keamanan: Sekuritisasi dan Keamanan Manusia

Penguatan basis teoretis artikel ini juga memerlukan penempatan strategi komunikasi sosial dalam konteks pergeseran paradigma keamanan yang lebih luas. Teori sekuritisasi (securitization theory) dari Mazhab Kopenhagen (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998) menjelaskan bahwa suatu isu dapat dikonstruksi sebagai ancaman keamanan melalui tindak tutur (speech act) oleh aktor yang memiliki otoritas, dan sebaliknya dapat pula “disekuritisasi” (desecuritized) untuk dikembalikan ke ranah politik biasa yang dapat diselesaikan melalui dialog, bukan tindakan represif. Kerangka ini relevan untuk memahami transformasi pendekatan keamanan di perbatasan RI-RDTL, dari kecenderungan mengonstruksi masyarakat perbatasan dan aktivitas lintas batas tradisional sebagai ancaman menuju pendekatan yang memandang masyarakat sebagai mitra keamanan.

Pergeseran ini sejalan dengan konsep keamanan manusia (human security) dari United Nations Development Programme (UNDP, 1994), yang mendefinisikan keamanan bukan semata sebagai ketiadaan ancaman militer terhadap negara, melainkan sebagai perlindungan individu dan komunitas dari berbagai ancaman terhadap kehidupan, mata pencaharian, dan martabat mereka, mencakup dimensi ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Ketika Satgas Pamtas melaksanakan civic action berupa pelayanan kesehatan gratis dan dukungan pendidikan, mereka tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan konvensional, tetapi juga berkontribusi pada pemenuhan dimensi keamanan manusia masyarakat perbatasan, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi kehadiran negara di wilayah tersebut.

Kombinasi antara teori sekuritisasi dan keamanan manusia menjelaskan mengapa rezim keamanan perbatasan yang ketat (hard-border security regime), sebagaimana didokumentasikan Scitepress (2018) dalam kajian pengelolaan perbatasan Indonesia-Timor Leste, perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih lunak dan berorientasi manusia. Pendekatan yang eksklusif mengandalkan kekuatan represif berisiko mereproduksi persepsi ancaman yang justru dapat memicu resistensi, sementara pendekatan yang mengintegrasikan keamanan manusia melalui komunikasi sosial berpotensi menciptakan siklus kepercayaan yang mendukung keberlanjutan stabilitas keamanan. Dengan demikian, strategi komunikasi sosial Satgas Pamtas dapat dipahami sebagai instrumen desekuritisasi yang terkendali (managed

desecuritization), yang tidak menghilangkan kewaspadaan keamanan, tetapi mengubah relasi keamanan dari yang bersifat konfrontatif menjadi kolaboratif.

2.6 Diplomasi Pertahanan dan Soft Power di Tingkat Lokal

Dimensi lain yang memperkaya kerangka konseptual artikel ini adalah teori diplomasi pertahanan (defense diplomacy) yang dirumuskan Cottey dan Forster (2004), yang mendefinisikannya sebagai penggunaan angkatan bersenjata dan sumber daya terkait untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan secara damai, termasuk melalui kontak, kerja sama, dan pembangunan kepercayaan dengan negara lain maupun aktor non-negara. Artikel ini mengusulkan perluasan konsep tersebut ke tingkat lokal atau akar rumput (grassroots defense diplomacy), yang merujuk pada praktik diplomasi informal yang dilakukan satuan tugas militer di lapangan melalui interaksi langsung dengan masyarakat di kedua sisi perbatasan (Amalia, 2024).

Grassroots defense diplomacy yang dijalankan Satgas Pamtas RI-RDTL menemukan relevansinya dalam konsep soft power yang dipopulerkan Nye (2004), yaitu kemampuan memengaruhi pihak lain untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui daya tarik (attraction) dan kredibilitas, bukan melalui paksaan atau imbalan material. Ketika Satgas Pamtas membangun citra positif melalui bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap adat, dan dialog yang setara dengan masyarakat kedua negara, mereka pada dasarnya sedang membangun soft power Indonesia di tingkat lokal, yang berkontribusi pada persepsi positif masyarakat perbatasan Timor-Leste terhadap kehadiran Indonesia.

Relevansi grassroots defense diplomacy semakin nyata mengingat sifat kawasan perbatasan RI-RDTL yang unik secara historis pascareferendum 1999: ketegangan di perbatasan sering dipicu oleh residu isu masa lalu, seperti keberadaan mantan pengungsi dan bekas anggota milisi, yang memerlukan penanganan berbasis kepercayaan dan sensitivitas historis (International Crisis Group, 2006, 2010). Diplomasi pertahanan tingkat lokal melalui komunikasi sosial menjadi mekanisme penting untuk meredam residu ketegangan tersebut tanpa memerlukan eskalasi ke tingkat diplomasi antarnegara yang lebih formal dan lambat, sekaligus memperkuat kepercayaan diri komunitas perbatasan dalam mengelola relasi lintas batas mereka sendiri secara damai. Aktivitas semacam ini selaras dengan komitmen bilateral yang lebih luas antara kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan pada momen-momen tertentu (Tatoli, 2025).

2.7 Studi Kawasan Perbatasan (Borderland Studies) dan Konteks RI-RDTL

Untuk memahami karakter unik kawasan perbatasan RI-RDTL secara lebih tajam, artikel ini merujuk pada tradisi borderland studies, khususnya kerangka konseptual Wilson dan Donnan (1998), yang membedakan antara “border” sebagai garis batas legal-formal yang ditetapkan negara, dan “borderland” sebagai ruang sosial-kultural di sekitar garis batas tersebut, tempat kehidupan masyarakat justru sering melampaui dan mengaburkan garis batas formal itu sendiri. Garis batas RI-RDTL sepanjang 268 kilometer secara administratif membelah Pulau Timor menjadi dua wilayah kedaulatan, tetapi secara sosial-kultural tidak serta-merta membelah jaringan kekerabatan, bahasa, dan tradisi masyarakat yang telah terjalin jauh sebelum garis batas modern ditetapkan.

Ketegangan konseptual antara border dan borderland inilah yang menjelaskan mengapa pendekatan keamanan yang murni berbasis garis batas (line-based security) tidak akan pernah sepenuhnya efektif tanpa disertai pemahaman terhadap dinamika sosial borderland yang melampaui garis tersebut. Strategi komunikasi sosial Satgas Pamtas, dengan menekankan pendekatan kearifan lokal dan penghormatan terhadap otoritas adat, pada dasarnya merupakan respons strategis terhadap realitas borderland ini: alih-alih menegaskan jaringan sosial lintas batas yang telah ada, Satgas Pamtas berupaya memanfaatkan jaringan tersebut sebagai infrastruktur sosial bagi pengumpulan informasi dan pemeliharaan stabilitas.

Perbandingan dengan kasus perbatasan lain memperkaya pemahaman kontekstual ini. Pengalaman keterlibatan komunitas dalam pengamanan perbatasan di Senegal (IOM, 2016) menunjukkan pola serupa: efektivitas pengelolaan keamanan perbatasan sangat ditentukan oleh sejauh mana otoritas keamanan mampu membangun hubungan kepercayaan dengan struktur sosial lokal yang telah ada. Demikian pula pengalaman pengelolaan perbatasan maritim pada kasus Laut Natuna Utara (Herdiawan & Ahmadi, 2025; Marliani, 2024; Sulistiani & Mutaal, 2024) dan Selat Malaka (Mayasari et al., 2025), yang meskipun berbeda karakter geografis, menegaskan pola umum yang sama: ketahanan wilayah perbatasan Indonesia senantiasa membutuhkan sinergi antara kapasitas pertahanan formal dan penguatan modal sosial masyarakat lokal sebagai dua pilar yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

2.8 Sintesis Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini menyusun kerangka konseptual terintegrasi yang menghubungkan seluruh landasan teori ke dalam satu alur logis. Titik tolaknya adalah doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (UU No. 3 Tahun 2002), yang memberikan mandat

normatif bagi Satgas Pamtas untuk melibatkan masyarakat sebagai komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara. Mandat ini diterjemahkan secara operasional melalui komunikasi strategis (Hallahan et al., 2007) dalam tiga dimensi: interpersonal, massa, dan budaya.

Ketiga dimensi komunikasi tersebut bekerja melalui mekanisme pembentukan modal sosial (Coleman, 1988; Putnam, 2000), khususnya penguatan bridging social capital tanpa merusak bonding social capital lintas batas yang telah ada secara historis. Modal sosial yang terbentuk menghasilkan peningkatan kepercayaan (trust) sebagai variabel antara, yang menurunkan biaya transaksi sosial dalam pertukaran informasi keamanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini ancaman. Proses ini sekaligus merepresentasikan pergeseran paradigma keamanan dari sekuritisasi (Buzan et al., 1998) menuju keamanan manusia (UNDP, 1994), dan pada level relasi lintas negara berfungsi sebagai grassroots defense diplomacy (Cotter & Forster, 2004) yang membangun soft power (Nye, 2004) Indonesia di kawasan perbatasan, dengan memperhatikan karakter unik borderland RI-RDTL (Wilson & Donnan, 1998).

Akumulasi dari seluruh proses tersebut adalah penguatan ketahanan wilayah dalam kerangka Astagatra (Lemhannas RI, 2024), khususnya pada gatra sosial-budaya dan gatra pertahanan-keamanan, yang pada gilirannya berkontribusi pada terciptanya stabilitas keamanan di kawasan perbatasan RI-RDTL. Kerangka konseptual ini menegaskan bahwa strategi komunikasi sosial bukan sekadar aktivitas pendukung (supporting activity) dalam operasi pengamanan perbatasan, melainkan mekanisme inti (core mechanism) yang menjembatani doktrin pertahanan semesta pada level normatif dengan pencapaian stabilitas keamanan pada level empiris. Alur kerangka ini dapat diringkas sebagai berikut: mandat pertahanan semesta → komunikasi strategis (interpersonal, massa, budaya) → modal sosial dan kepercayaan → desekuritisasi dan keamanan manusia serta grassroots defense diplomacy → penguatan ketahanan wilayah (Astagatra) → stabilitas keamanan perbatasan.

2.9 Kebaruan dan Kontribusi Konseptual

Kajian terdahulu mengenai keamanan perbatasan RI-RDTL (International Crisis Group, 2006, 2010; Scitepress, 2018) umumnya menempatkan analisis pada level kebijakan bilateral dan tata kelola keamanan formal antarnegara. Kajian mengenai ketahanan wilayah perbatasan lain di Indonesia (Herdiawan & Ahmadi, 2025; Puspitawati et al., 2023; Sulistiani & Mutaal, 2024) sebagian besar berfokus pada konteks maritim. Artikel ini mengisi celah di antara keduanya

dengan menempatkan strategi komunikasi sosial satuan tugas lapangan sebagai unit analisis utama pada konteks perbatasan darat, sekaligus menghubungkannya secara eksplisit dengan teori tingkat menengah yang jarang diintegrasikan secara bersamaan, yaitu modal sosial, sekuritisasi/keamanan manusia, dan diplomasi pertahanan tingkat lokal.

Kontribusi konseptual utama artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, perluasan konsep diplomasi pertahanan (Cottey & Forster, 2004) dari praktik antarnegara pada level strategis ke level taktis-lokal melalui konsep grassroots defense diplomacy. Kedua, menjembatani teori modal sosial dari sosiologi Barat (Coleman, 1988; Putnam, 2000) dengan konteks masyarakat adat perbatasan yang memiliki struktur kekerabatan lintas negara. Ketiga, menempatkan strategi komunikasi sosial sebagai mekanisme penghubung (linking mechanism) antara doktrin pertahanan semesta yang bersifat normatif-yuridis dan konsep ketahanan wilayah yang bersifat sosiologis-empiris.

Kerangka konseptual ini juga membuka ruang metodologis bagi penelitian lanjutan. Penelitian mendatang dapat mengembangkan indikator terukur untuk komponen kepercayaan dan modal sosial, misalnya melalui survei persepsi masyarakat perbatasan atau pemetaan jaringan sosial (social network analysis), guna menguji secara empiris alur kausal yang diusulkan dalam kerangka ini.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap dokumen kebijakan, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga internasional, dan berbagai publikasi resmi terkait pengelolaan keamanan perbatasan RI-RDTL, yang sekaligus berfungsi sebagai subjek penelitian. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkinian informasi yang disajikan.

Objek penelitian adalah strategi komunikasi sosial yang diterapkan Satgas Pamtas RI-RDTL, mencakup bentuk, mekanisme, dan implementasinya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kecenderungan, tema strategis, serta hubungan sebab-akibat antara implementasi strategi komunikasi sosial, ketahanan wilayah, dan stabilitas keamanan, dengan menggunakan kerangka konseptual pada Bagian 2 sebagai lensa interpretasi: temuan dikategorikan ke dalam tiga dimensi komunikasi strategis (interpersonal,

massa, budaya), kemudian ditelusuri kaitannya dengan pembentukan modal sosial dan kepercayaan, pergeseran ke arah keamanan manusia, praktik grassroots defense diplomacy, dan penguatan gatra Astagatra yang relevan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang berperan mengidentifikasi, memilih, mengumpulkan, mengelompokkan, dan menganalisis berbagai sumber data yang relevan, mengikuti prinsip kredibilitas dan konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2016).

4. Hasil dan Pembahasan

a. Implementasi Strategi Komunikasi Sosial Satgas Pamtas RI-RDTL

Dimensi Komunikasi Interpersonal. Implementasi komunikasi interpersonal oleh Satgas Pamtas RI-RDTL diwujudkan melalui beragam kegiatan civic action yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, meliputi pembangunan infrastruktur sosial, pelayanan kesehatan gratis, serta program dukungan pendidikan di kawasan perbatasan. Dalam kerangka komunikasi strategis (Hallahan et al., 2007), kegiatan-kegiatan tersebut berfungsi bukan hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen relational communication yang secara sengaja dirancang untuk meningkatkan kepercayaan publik, mempererat hubungan sosial, dan memperkuat sinergi antara prajurit TNI dengan komunitas perbatasan. Dilihat dari perspektif modal sosial (Coleman, 1988; Putnam, 2000), setiap kegiatan civic action pada dasarnya adalah investasi dalam pembentukan bridging social capital antara negara dan masyarakat perbatasan.

Dinamika komunikasi di kawasan perbatasan tidak hanya berlangsung melalui mekanisme formal, tetapi juga berkembang melalui hubungan informal yang lebih fleksibel dan responsif. Temuan penelitian tentang koordinasi keamanan perbatasan mengungkapkan bahwa platform komunikasi digital seperti WhatsApp menjadi instrumen utama dalam pertukaran informasi antara aparat keamanan dan masyarakat terkait potensi pelanggaran maupun aktivitas ilegal di wilayah perbatasan (Jurnal PTIK, 2025). Berdasarkan karakteristik tugas dan lingkungan operasi yang serupa, dapat diasumsikan bahwa Satgas Pamtas RI-RDTL juga memanfaatkan pola komunikasi informal tersebut untuk memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung deteksi dini terhadap berbagai ancaman keamanan—sebuah manifestasi konkret dari penurunan biaya transaksi sosial sebagaimana dijelaskan pada kerangka modal sosial.

Dimensi Komunikasi Massa. Satgas Pamtas memanfaatkan forum-forum komunitas, pertemuan adat, dan kegiatan keagamaan sebagai saluran komunikasi massa. Pendekatan ini memungkinkan penyebaran informasi mengenai kebijakan keamanan, prosedur perlintasan batas, dan pentingnya kerja sama masyarakat dalam pengamanan wilayah. Kajian mengenai tata kelola keamanan perbatasan menunjukkan bahwa koordinasi formal antarinstansi terkait masih sering berlangsung secara insidental dan berorientasi pada respons terhadap permasalahan yang telah terjadi. Keterbatasan tersebut menjadikan komunikasi langsung dengan masyarakat sebagai instrumen penting dalam memperoleh informasi, memahami dinamika lokal, serta mengantisipasi potensi ancaman sejak dini (Jurnal PTIK, 2025). Dalam kerangka ini, Satgas Pamtas berperan sebagai mediator strategis yang menjembatani implementasi kebijakan pemerintah dengan realitas sosial masyarakat perbatasan—peran yang, dalam bahasa *borderland studies* (Wilson & Donnan, 1998), mencerminkan upaya menegosiasikan batas formal negara dengan realitas sosial *borderland* yang melampauinya.

Dimensi Komunikasi Budaya. Karakteristik sosial budaya masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan RI-RDTL menunjukkan adanya kedekatan historis yang tercermin dalam kesamaan etnis, bahasa, serta tradisi adat yang berkembang secara turun-temurun. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Satgas Pamtas mengimplementasikan strategi komunikasi budaya yang berlandaskan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal, diwujudkan melalui keterlibatan dalam kegiatan adat, penghargaan terhadap otoritas kepemimpinan tradisional, serta pemanfaatan bahasa lokal sebagai sarana membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara. Dalam kerangka modal sosial, pendekatan ini secara spesifik menjaga bonding social capital masyarakat perbatasan agar tidak terganggu oleh kehadiran aktor eksternal, sekaligus membangun bridging social capital secara bertahap dan berkelanjutan.

b. Pengaruh Strategi Komunikasi Sosial terhadap Ketahanan Wilayah

Peningkatan Kepercayaan Masyarakat. Keberhasilan strategi komunikasi sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan telah menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap kehadiran Satgas Pamtas di wilayah perbatasan. Sebagaimana dijelaskan dalam teori modal sosial (Putnam, 2000), kepercayaan masyarakat merupakan aset sosial yang berperan penting dalam membangun sinergi antara aparat keamanan dan warga. Hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya tersebut memperkuat efektivitas sistem deteksi dini berbasis masyarakat, karena warga menjadi lebih terbuka dalam memberikan informasi, lebih

responsif dalam melaporkan potensi ancaman, serta lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan wilayah dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan nasional.

Pengurangan Konflik Lintas Batas. Dalam perspektif keamanan perbatasan, diplomasi pertahanan yang dilaksanakan Satgas Pamtas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penguatan hubungan bilateral di tingkat akar rumput (*grassroots defense diplomacy*, Cottey & Forster, 2004), tetapi juga sebagai sarana mitigasi konflik yang efektif. Kehadiran Satgas sebagai aktor yang mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat kedua negara telah menciptakan ruang dialog yang kondusif untuk mengelola berbagai potensi gesekan sosial di kawasan perbatasan. Dibaca melalui teori sekuritisasi (Buzan et al., 1998), proses ini pada dasarnya adalah desekuritisasi terkendali: isu-isu lokal yang berpotensi dikonstruksi sebagai ancaman keamanan diarahkan kembali menjadi persoalan sosial yang dapat diselesaikan melalui dialog. Kondisi ini berdampak pada menurunnya frekuensi maupun intensitas konflik lintas batas karena setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih cepat sebelum berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan. Temuan tersebut selaras dengan pandangan International Crisis Group (2006) yang menegaskan bahwa penguatan kerja sama keamanan dan komunikasi yang berkesinambungan merupakan faktor penting dalam mencegah eskalasi konflik di wilayah perbatasan.

Penguatan Partisipasi Masyarakat. Keberhasilan strategi komunikasi sosial Satgas Pamtas tidak hanya tercermin dari meningkatnya hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat, tetapi juga dari perubahan orientasi peran masyarakat dalam sistem pertahanan negara. Masyarakat yang sebelumnya diposisikan sebagai objek pengamanan berkembang menjadi mitra strategis yang berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pendukung keamanan wilayah, mulai dari pemantauan lingkungan, pengawasan jalur lintas batas, hingga pelaporan dini terhadap potensi gangguan keamanan. Dibaca melalui doktrin *Sishankamrata* (UU No. 3 Tahun 2002), transformasi ini merupakan aktualisasi konkret dari fungsi masyarakat sebagai komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara. Ronaldi (2025) menegaskan bahwa paradigma pertahanan total menempatkan masyarakat lokal sebagai elemen penting dalam menciptakan keseimbangan antara aspek keamanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan, yang sejalan pula dengan pemenuhan dimensi keamanan manusia (UNDP, 1994) yang menjadi salah satu tujuan strategi komunikasi sosial.

c. Kontribusi Ketahanan Wilayah terhadap Stabilitas Keamanan

Penguatan ketahanan wilayah melalui strategi komunikasi sosial memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas keamanan di kawasan perbatasan RI-RDTL melalui empat jalur. Pertama, pencegahan konflik: ketahanan wilayah yang kuat, sebagaimana tercermin pada penguatan gatra sosial-budaya dan pertahanan-keamanan dalam kerangka Astagatra (Lemhannas RI, 2024), menciptakan buffer zone yang mampu menyerap dan menetralkan potensi konflik sebelum meluas. Kedua, pengendalian kejahatan lintas batas: partisipasi aktif masyarakat dalam pengamanan meningkatkan efektivitas pengendalian perdagangan ilegal, penyelundupan, dan perlintasan gelap, sebagai wujud nyata dari modal sosial yang telah terbangun. Ketiga, stabilitas sosial-ekonomi: lingkungan yang aman dan harmonis mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan, mengurangi pemicu konflik akibat persaingan sumber daya, sekaligus memperkuat gatra ekonomi dalam kerangka Astagatra. Keempat, diplomasi pertahanan: keberhasilan Satgas Pamtas dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat perbatasan berfungsi sebagai grassroots defense diplomacy yang memperkuat citra positif dan soft power (Nye, 2004) Indonesia di mata negara tetangga.

d. Kerangka Konseptual Terintegrasi: Dari Komunikasi Sosial menuju Stabilitas Keamanan

Menggabungkan seluruh temuan di atas, dapat disusun sebuah alur konseptual yang menjelaskan bagaimana strategi komunikasi sosial Satgas Pamtas RI-RDTL pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas keamanan perbatasan. Alur tersebut dimulai dari mandat doktrin pertahanan semesta yang memberi legitimasi bagi keterlibatan masyarakat dalam pertahanan negara, kemudian diterjemahkan melalui tiga dimensi komunikasi strategis (interpersonal, massa, budaya) yang dijalankan Satgas Pamtas di lapangan. Ketiga dimensi ini membentuk modal sosial dan kepercayaan sebagai mekanisme antara, yang secara simultan menggeser pendekatan keamanan dari sekuritisasi menuju keamanan manusia dan menghasilkan praktik grassroots defense diplomacy di tingkat lokal. Akumulasi proses ini memperkuat gatra sosial-budaya dan pertahanan-keamanan dalam kerangka Astagatra, yang pada akhirnya bermuara pada empat kontribusi konkret terhadap stabilitas keamanan: pencegahan konflik, pengendalian kejahatan lintas batas, stabilitas sosial-ekonomi, dan penguatan diplomasi pertahanan. Kerangka ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi sosial bukan aktivitas perifer, melainkan mekanisme inti yang menjembatani doktrin pertahanan pada level normatif dengan pencapaian stabilitas keamanan pada level empiris di kawasan perbatasan RI-RDTL.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi komunikasi sosial merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan, dan mekanisme pengaruhnya dapat dijelaskan secara teoretis melalui kerangka konseptual yang mengintegrasikan doktrin pertahanan semesta, komunikasi strategis, modal sosial, keamanan manusia, diplomasi pertahanan, dan Astagatra. Implementasi strategi komunikasi sosial oleh Satgas Pamtas RI-RDTL melalui pendekatan interpersonal, media komunikasi publik, dan komunikasi berbasis budaya lokal telah berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat, penguatan partisipasi warga dalam menjaga keamanan wilayah, serta terciptanya stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Dengan demikian, komunikasi sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam memperkuat ketahanan wilayah sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, secara khusus melalui: pertama, membangun kepercayaan masyarakat perbatasan terhadap aparat keamanan; kedua, mengurangi potensi konflik lintas batas melalui diplomasi pertahanan lokal; ketiga, menguatkan partisipasi masyarakat sebagai komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara sekaligus garda terdepan ketahanan nasional; dan keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi stabilitas keamanan dan pembangunan wilayah perbatasan.

Secara teoretis, artikel ini memberikan kontribusi berupa kerangka konseptual terintegrasi yang menjelaskan mekanisme di balik pengaruh komunikasi sosial terhadap ketahanan wilayah, yaitu melalui pembentukan modal sosial dan kepercayaan sebagai variabel antara, pergeseran paradigma dari sekuritisasi menuju keamanan manusia, serta praktik grassroots defense diplomacy di tingkat lokal. Kerangka ini memperluas cakupan teori diplomasi pertahanan dan modal sosial ke konteks operasi satuan tugas lapangan yang selama ini jarang dianalisis melalui lensa tersebut.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan agar strategi komunikasi sosial diinstitutionalisasi ke dalam doktrin dan standar operasional prosedur (SOP) Satgas Pamtas, disertai peningkatan kompetensi prajurit melalui pelatihan komunikasi lintas budaya dan diplomasi pertahanan tingkat lokal. Selain itu, perlu dikembangkan sistem komunikasi terpadu yang menghubungkan Satgas, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemanfaatan platform digital informal yang telah terbukti efektif dalam koordinasi



keamanan berbasis masyarakat. Program komunikasi sosial juga perlu disinergikan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat guna memperkuat gatra ekonomi dan kesejahteraan sebagai bagian dari ketahanan wilayah secara menyeluruh. Di sisi lain, penguatan kerja sama dan koordinasi lintas batas dengan aparat keamanan Timor-Leste menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan mengelola berbagai isu perbatasan secara kolaboratif. Untuk penelitian lanjutan, disarankan pengujian empiris terhadap kerangka konseptual yang diusulkan dalam artikel ini, misalnya melalui survei persepsi kepercayaan masyarakat perbatasan atau pemetaan jaringan sosial, guna memperkuat generalisasi dan daya prediksi model ini pada konteks perbatasan Indonesia lainnya.

Daftar Pustaka

- Amalia, F. S., Mahroza, J., T., R. M., Halkis, M., Priyanto, Purwanto, S., Gunawan, R., Hendarwoto, Y., & David, L. (2024). *Diplomasi pertahanan Indonesia–Australia untuk humanitarian assistance and disaster relief (HADR)*. Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/569654-diplomasi-pertahanan-indonesia-australia-e30b6e4c.pdf>
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping defence diplomacy: New roles for military cooperation and assistance (Adelphi Paper 365)*. International Institute for Strategic Studies.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Hallahan, K., Holtzhausen, D., van Ruler, B., Verčič, D., & Sriramesh, K. (2007). Defining strategic communication. *International Journal of Strategic Communication*, 1(1), 3–35. <https://doi.org/10.1080/15531180701285244>
- Herdiawan, D., & Ahmadi, A. (2025). Development of national resilience strategies in Indonesia's marine border areas, especially in the northern Natuna sea, Malacca strait, and Sulawesi sea. *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, 24(3), 1–11. <https://doi.org/10.30574/gjeta.2025.24.3.0255>
- International Crisis Group. (2006). *Managing tensions on the Timor-Leste/Indonesia border (Asia Briefing No. 50)*.



- https://www.files.ethz.ch/isn/16805/b50_managing_tensions_on_timor_leste_indonesia_border.pdf
- International Crisis Group. (2010). Timor-Leste: Oecusse and the Indonesian border (Asia Briefing No. 104). <https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/b104-timor-leste-oecusse-and-the-indonesian-border.pdf>
- International Organization for Migration. (2016). Communities engagement in border security and management in Senegal. <https://rodakar.iom.int/sites/g/files/tmzbd1696/files/documents/sociological-assessment-report-of-border-communities-in-senegal-mauritania-en-2016.pdf>
- Jurnal PTIK. (2025). Addressing Indonesia-Timor Leste border security in the post-... Jurnal Ilmu Komunikasi. <https://jurnalptik.id/JIK/article/download/690/2477>
- Lemhannas RI. (2024). Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010112200000000105/swf/7552/PPRA%2064%20-%2092.pdf>
- Marliani, M. (2024). Enhancing maritime security: Challenges and strategies in Indonesia's Natuna Sea. *Journal of Maritime Policy and Security*. <https://doi.org/10.31629/jmps.v1i1.6996>
- Mayasari, E., Ali, Y., & Risdhianto, A. (2025). Bilateral relations between Indonesia and Malaysia in handling illegal fishing and maritime border areas. *Journal of Social Research*, 4(8), 2127–2132. <https://doi.org/10.55324/josv4i8.2721>
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Puspitawati, D., Prakoso, L. Y., Kusumaningrum, A., & Harahab, N. (2023). Reconstruction of state territorial management to optimize national resilience in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 21–41. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.23636>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Ronaldi, T. (2025). Strengthening national resilience through integration of public policy and defense strategy in border regions. *Journal of National Paradigm-Based Resilience Strategy*, 2(2). <https://doi.org/10.61511/napbres.v2i02.2025.2138>
- Scitepress. (2018). The maritime border management of Indonesia and Timor-Leste. In *Proceedings of the International Conference on Security and Management*. <https://www.scitepress.org/PublishedPapers/2018/102770/102770.pdf>
- Sulistiani, A., & Mutaal, M. R. U. (2024). Strategic-based regional development in border area for national defense: Insight from Natuna regency amid the South China Sea dispute. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(2), 118–131.



Tatoli. (2025, Desember 16). Timor-Leste and Indonesia commit to ensuring border security during Christmas and New Year. Tatoli. <https://en.tatoli.tl/2025/12/16/timor-leste-and-indonesia-commit-to-ensuring-border-security-during-christmas-and-new-year/14/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

United Nations Development Programme. (1994). Human development report 1994: New dimensions of human security. Oxford University Press.

Wilson, T. M., & Donnan, H. (Eds.). (1998). Border identities: Nation and state at international frontiers. Cambridge University Press.

Catatan Penulis: Artikel ini disusun berdasarkan studi literatur dan analisis dokumen kebijakan yang tersedia secara publik.